BAB III
ETIKA ISLAM TENTANG PEMBERITAAN

A. Pengertian Etika Islam

Persoalan etika sangat erat berhubungan dengan agama, bahkan seringkali perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari dilandasi oleh motivasi agama. Orang sering menghubungkan suatu keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan didasari keyakinan bahwa perbuatan tersebut diperintahkan atau dilarang oleh agama. Tentu saja landasan perbuatan dan tingkah laku manusia itu tidak hanya dilandasi oleh ketentuan-ketentuan dalam agama saja, tetapi landasan-landasan berperilaku ini bisa berasal dari banyak sumber seperti pemikiran filsafat dan adat-istiadat. Namun demikian pandangan-pandangan dari ajaran agama memiliki peran yang cukup besar dalam pembentukan tingkah laku manusia. Perbuatan manusia yang sesuai dengan perintah Tuhan atau agama dipandang sebagai perbuatan yang baik dan dikatakan beretika, bermoral atau berakhlak, sedangkan perbuatan yang melanggar larangan-larangan dalam agama akan dinilai sebagai perbuatan yang buruk dan disebut tidak beretika, *immoral* atau akhlak yang buruk. Agama memberi tuntunan bagi manusia menjalani kehidupan ini dalam bentuk acuan tingkah laku dan perbuatan.

Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai penggunaan kata etika, moral, dan akhlak. Istilah-istilah tersebut seringkali dianggap sama maknanya, sehingga kadangkala dipergunakan secara tumpang tindih dan rancu. Hal ini sangat mungkin terjadi karena pada dasarnya istilah-istilah tersebut sama-sama berhubungan dengan perbuatan manusia dan penilaian atas perbuatan tersebut, yakni baik atau buruk. Namun sebenarnya istilah-istilah tersebut memiliki sisi pandang yang berbeda dalam melihat perbuatan manusia.

Menurut K. Bertens, etika berasal dari kata *ethos* dari bahasa Yunani yang artinya tempat tinggal yang biasa; adat istiadat; watak, sikap dan cara berfikir. Menurut pendapat para ahli bahasa Indonesia, istilah dengan akhiran –

“ika” harus dipakai untuk menunjukan ilmu, maka istilah etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaaan. (Bertens, 2002 : 4) Atau menurut Franz Magnis Suseno, etika adalah filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran, norma-norma, nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan pandangan moral secara kritis. (Suseno, 1993 : 14)

Sedangkan moral berasal dari kata *mores* dalam bahasa Latin yang artinya sama dengan *ethos* dalam bahasa Yunani, yaitu adat istiadat, tingkah laku, kebiasaan. (Bertens, 2002 : 5) moral sebagai nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, yakni yang menyangkut kegiatan-kegiatan manusia yang dipandang sebagai baik/buruk, benar/salah, atau menyangkut cara seseorang bertingkah laku dalam hubungannya dengan orang lain. Pengertian moral ini mencakup cara bertingkahlaku terhadap pihak lain dan norma yang mendasari cara berperilaku tersebut. Suatu perbuatan dipandang bermoral apabila sesuai dengan kebiasaan atau adat istiadat tertentu, yang tentu saja proses menjadi kebiasaan dan menjadi adat istiadat karena perbuatan tersebut dinilai baik dan berguna oleh suatu masyarakat. Kebalikan dari itu, perbuatan yang melanggar kebiasaan atau adat istiadat akan dinilai sebagai perbuatan yang *immoral* atau *amoral*, yakni perbuatan yang tidak mengandung atau melanggar moral. (Bertens, 2002 : 7)

Dengan demikian etika dan moral memang sangat erat dalam segi arti, tetapi dalam penerapannya, istilah etika dipergunakan untuk meninjau perbuatan manusia dari sisi teoritik atau keilmuan tentang perbuatan tersebut, atau juga bisa dimaksudkan dengan filosofisnya. Sedangkan moral berada di sisi praktisnya, yaitu tingkahlaku perbuatan dan perilaku manusia itu sendiri. Pemaknaan etika tersebut menunjukkan bahwa etika sebagai nama dari filsafat moral ketika etika itu menjadi studi filosofis terhadap moral. Jadi bila dalam moral, seseorang atau kelompok dituntut untuk berperilaku secara benar dan baik, maka dalam hal etika menuntut pemahaman tentang sistem, alasan dan dasar-dasar moral serta konsep-konsepnya secara rasional untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Tentang etika dan moral dalam pemikiran Islam dikenal istilah akhlak (*al-akhlaq*). Kata akhlak secara etimologi, dalam al-Quran tidak diketemukan, kecuali

bentuk tunggalnya yaitu *khuluq*[1] diartikan dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku dan tabiat.(Asmaraman, 1992 : 1)[2] Dengan demikian sebenarnya istilah akhlak lebih dekat dengan pengertian moral, karena akhlak sendiri dipandang sebagai sesuatu yang aplikatif. Sedangkan ilmu yang mempelajari atau membahas tentang baik dan buruk perilaku atau perbuatan disebut dengan *falsafah akhlakiyah* atau *ilmu akhlak*, (Syukur, 2004 : 3) yakni ilmu tentang keutamaan-keutamaan dan bagaimana cara mendapatkannya agar manusia berhias dengannya, dan ilmu tentang hal-hal yang hina dan cara manusia terbebas daripadanya.

Senada dengan itu, Ahmad Amin (1991: 3) membedakan akhlak dalam dua aspek empiris dan filosofis. Secara empiris, akhlak adalah perilakunya, sedangkan dalam aspek filosofis dipergunakan istilah ilmu akhlak, yaitu ilmu yang menerangkan tentang pengertian baik dan buruk, menjelaskan apa yang harus dilakukan manusia dalam hubungannya dengan sesamanya, menjelaskan tujuan yang seharusnya dituju oleh manusia dan menunjukkan jalan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya diperbuat. Dengan demikian, akhlak memiliki pengertian yang lebih khas dibandingkan dengan etika atau moral. Akhlak merujuk kondisi psikologis atau kejiwaan sehubungan dengan kebiasaan atau proses pembiasaan menuju terciptanya perbuatan atau tingkah laku.

Pengertian di atas menunjukkan, sebenarnya antara moral dan etika, antara akhlak dengan ilmu akhlak, tidak dapat dipisahkan dalam tuntutan praktisnya, meskipun secara keilmuan pembedaan ini menjadi perlu untuk memudahkan kajian ilmiahnya. Itu sebabnya kajian tentang perilaku dalam Islam istilah ilmu akhlak tidak begitu populer. Hal ini karena kecenderungan pandangan ilmuwan Islam, bahwa bahwa seluruh *ulum al-'Arab* tanpa kecuali mengisyaratkan unsur-unsur akhlak. (Syukur, 2004 : 3) Akhlak sebagai etika Islam merujuk pada keyakinan etikal yang harus dipenuhi sekaligus pelaksanaan dari keyakinannya

---

[1] Dalam analisis semantik Sheila McDonough, dikatakan *khuluq* memiliki akar kata yang sama *khalaqa* yang artinya menciptakan (*to create*) dan membentuk (*to shape*) atau memberi bentuk (*to give form*). Kata yang akar katanya sama dengan itu pula adalah *Al-Khaliq* (Maha Pencipta) dan *makhluq* (makhluk, ciptaan). (Tafsir dkk. 2002 : 14)

[2] Di antaranya adalah dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4, "Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang luhur."

tersebut. Bahkan etika dalam kajian para filosof muslim menjadi bagian dari tema keimanan, yakni akhlak menjadi perwujudan dari keimanan itu. (Subhi, 2001 : 30)

A.1. Al-Qur'an dan As-Sunah sebagai Dasar Etika Islam

Sumber ajaran Islam yang paling pokok adalah berasal dari Al-Qur'an sebagai wahyu dari Allah, dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kehidupan manusia diyakini oleh umat Islam bertujuan untuk mengabdi kepada Allah[3] dan sekaligus menjadi khalifah (*co-worker*) Allah[4] dalam menciptakan kerahmatan di muka bumi[5]. Oleh karena itu Allah membekali manusia dengan Akal sebagai perangkat untuk untuk memahami alam semesta ini, dan Al-Qur'an-As-Sunnah[6] sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga etika Islam pun mengacu kepada kedua sumber ini untuk mendapatkan mendapatkan petunjuk dan model[7] bagi landasan filsafati dari perilaku, dan standar perbuatan baik dan buruk.

Etika pada umumnya didasari dengan pertimbangan akal pikiran, kerangka filsafat tertentu, moralitas atau adat kebiasaan suatu masyarakat tertentu. Namun akhlak sebagai etika dalam Islam, landasan nilai baik dan buruk didasarkan pada sumber-sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Konsep-konsep etika dalam Islam sangat luas dan kompleks, oleh karena itu pembahasan

---

[3] "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." (QS. Adz-Dzariyyat : 56)

[4] "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi'.." (QS. Al-Baqarah : 30)

[5] "Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta." (QS. Al-Anbiya: 107)

[6] Al-Qur'an sebagai wahyu Allah yang disampaikan kepada umat Islam melalui Nabi Muhammad SAW. sehingga perilaku Nabi dipandang sebagai penafsiran Al-Qur'an paling faktual. Bahkan di banyak riwayat ditegaskan bahwa Nabi tidak bertindak/berperilaku melainkan karena tuntunan wahyu, dan akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Itu sebabnya dalam keilmuan Islam, termasuk etika Islam tidak melepaskan dasar pemikirannya dari Al-Qur'an dan Sunah Nabi SAW.

[7] "Alif lam mim. Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa" (QS. Al-Baqarah : 1-2), "Sesunguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang megharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. (QS. Al-Ahzab : 21), "Aku tinggalkan untuk kamu dua perkara, tidaklah kamu akan sesat selama-lamanya, selama kamu masih berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunah rasul-Nya." (al-hadits).

berbagai peraturan moral dalam Islam ditunjukkan dalam tingkatan-tingkatan perbuatan. Tingkatan-tingkatan perbuatan tersebut adalah :

1. *wajib*, keharusan: tugas yang diperintahkan Tuhan mutlak harus dilakukan, bila meninggalkan dikenakan sanksi hukuman.
2. *Mandub* atau *sunnah*, dianjurkan: suatu perbuatan yang dianjurkan tetapi tidak diharuskan, bila melakukan akan mendapat pahala, bila meninggalkan tidak mendapat hukuman.
3. *Ja'iz* atau *mubah*, boleh: perbuatan yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan, tidak mempunyai konsekuensi pahala maupun hukuman.
4. *Makruh*, tidak disukai: perbuatan yang tidak disukai tetapi tidak dilarang, bila ditinggalkan akan mendapat pahala, tetapi jika melakukan tidak mendapat hukuman.
5. *Mahzur* atau *haram*, dilarang: suatu perbuatan yang dilarang Tuhan, dengan demikian jika melakukannya akan mendapat hukuman. (Izutsu, 1993 : 24)

Posisi Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam pemikiran etika Islam atau akhlak memang menduduki sumber utama, tetapi etika Islam juga terbuka kepada sumber-sumber yang lain seperti rasio atau filsafat dan adat masyarakat. Hal ini karena ada beberapa aturan etika yang termasuk dalam wilayah rasional seperti akhlak dalam kehidupan sosial dan sebagainya. Sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Ghazali yang memandang: "orang-orang Turki, Kurdi, dan Badui yang primitif dan eksistensi mereka lebih tinggi daripada binatang, dengan akal nalurinya dapat mengetahui bahwa seseorang harus menghormati yang lebih tua, sebagai hasil dari pengalaman dan penggunaan akal mereka." (Syukur, 2002, 184)

Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa akal mengetahui baik dan buruk sebagian besar perbuatan. Syari'at tidak membawa sesuatu yang sungguh-sungguh bertentangan dengan akal. Selain itu, *taklif* (adanya kewajiban) mensyaratkan adanya akal bagi manusia. Syariat dapat berubah karena akal menunjukkan bahwa taklif mengikuti kemaslahahan perbuatan tertentu. Perintah Syari'at juga dapat dinasakh sepanjang pemberlakuannya mengandung kerusakan. (Shubhi, 2001:139)

Berangkat dari sumber pokok ini –Al-Qur'an dan As-Sunnah—dan perangkat akal, dalam dunia Islam telah menumbuhkan pemikiran yang sangat kaya tentang etika ini. Terlebih dengan munculnya keilmuan seperti tafsir, kalam, fiqh dan tasawuf, menjadikan teoritisasi etika Islam menjadi beragam. Muhammad Mahmud Subhi (2001 : 37) membagi tiga pemikiran besar tentang etika Islam, yakni mazhab rasionalis (*Aqliyyah*) yang diwakili kelompok Mu'tazilah, mazhab intuisionis (*Dzauqiyyah* atau *Hadsiyyah*) sebagaimana ditunjukkan oleh kelompok tasawuf seperti Al-Ghazali, dan mazhab Ekletik yang memadukan antara pemikiran filsafat rasional dengan pemikiran mistisisme Islam, di mana pemikiran Ibn Miskawaih dan *Ikhawan Al-Shafa* dimasukkan dalam kelompok ini.

Madjid Fakhry (1996 : xix-xiv) dibagi pemikiran tentang etika Islam atau ilmu akhlak ini oleh dalam empat kelompok, yaitu:

1. Moralitas Skriptualis yang mendasarkan etikanya pada pernyataan-pernyataan atau quai-quasi moral al-Qur'an dan Sunnah;
2. Etika Teologis yang mendasarkan pemikiran etika dari al-Qur'an dan Sunnah dengan menformulasikannya pada pemikiran-pemikiran teologis;
3. Etika Filosofis yang mencoba menurunkan pemikiran-pemikiran Yunani yaitu filsafat Yunani dengan argumentasi-argumentasi Islam;
4. Etika Religius yang menurut Madjid Fakhry adalah bentuk terbaik dari pemikiran etika Islam, yakni memadukan pandangan dunia al-Qur'an, konsep-konsep teologi, kategori-kategori filafat dan mistisisme Islam.

Sedangkan kajian epistemologi terhadap nilai suatu perbuatan dalam etika Islam oleh Goerge F. Hourani dikelompokkan dalam beberapa aliran, yakni:

1. Obyektivisme: baik atau benar memiliki nilai obyektif yaitu apabila terdapat kualitas baik atau benar pada perbuatan itu. Aliran ini biasanya dianut oleh kelompok Mu'tazilah dan para filosof muslim.
2. Subyektivisme atau *ethical voluntarism*: baik atau benar tidak memiliki arti yang obyektif, tetapi sesuai dengan kehendak atau perintah dari seseorang

atau bentuk lain. Aliran ini terbagi dua: a). benar yang sesuai perintah atau ketetapan ummah; dan b). benar yang sesuai ketetapan Allah.

3. Rasionalisme atau intuisionisme: baik atau benar dapat diketahui dengan akal semata atau akal bebas. Akal manusia dipandang mampu membuat keputusan etika yang benar berdasarkan data pengalaman tanpa merujuk pada wahyu.
4. Tradisionalisme : baik atau benar tidak akan pernah dapat diketahui dengan akal semata, tetapi hanya dapat diketahui dengan wahyu atau sumber-sumber lain yang merujuk pada wahyu. Aliran ini bukan sama sekali meninggalkan akal, karena akal tetap berguna dalam menafsirkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah, menetapkan *ijma'* atau menarik *qiyas*. Aliran ini biasanya dianut oleh para *fuqaha* dan *mutakallimun*. (Syukur, 2004 : 21-22)

Meskipun para pengkaji etika Islam terbagi dalam beberapa kelompok, semua aliran etika tersebut di atas tetap menggunakan pijakan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan meramunya dengan sumber-sumber lain, meskipun dengan kadar yang berbeda-beda. Oleh karena etika Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka hakikatnya Islam itu sendiri adalah akhlak, seluruh aspek dalam ajaran yang disyari'atkan dalam Islam mengandung muatan etika. Secara umum Amin Syukur (2003 : 120-123) menggambarkan karakteristik etika Islam antara lain :

1. Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber nilai
2. Meletakkan akal dan naluri dalam proporsi masing-masing sebagai anugerah Allah yang membutuhkan bimbingan dari wahyu.
3. Iman sebagai sumber motivasi
4. Ridla Allah sebagai tujuan akhir (*ultimate goal*)
5. Penilaian tidak didasarkan pada tindakan lahiriyah semata, tetapi berpangkal pada motif atau niat.
6. Sanksi pelanggaran norma mencakup sanksi di dunia dan di akherat.
7. Akhlak Islam meliputi semua aspek kehidupan manusia baik individu maupun sosial.
8. Etika Islam berlaku universal dan setara bagi semua umat muslim di seluruh dunia.

A.2. Etika Islam Bertolak dari Jiwa

Satu hal lagi yang khas tentang etika Islam adalah perhatian etika Islam bertolak dari kondisi kejiwaan manusia. Dalam setiap pembahasan etika Islam atau akhlak ini para etikawan Islam selalu membicarakannya bertolak dari kondisi jiwa atau keadaan yang tertanam dalam jiwa. Menurut Ibn Miskawaih (932-1030), "*Khuluq* (akhlak) adalah keadaan jiwa yang mendorong (mengajak) untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa dipikir dan dipertimbangkan lebih dahulu".(Miskawaih, 1994 : 56) Asmaran mengutip Ibrahim Anis seorang cendikiawan Mesir mengatakan “Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.”. (Asmaran, 1992 : 2)

Demikian juga yang diutarakan oleh Al-Ghazali (1058-1111), "*Khuluk* (akhlak) adalah sifat atau bentuk atau keadaan yang tertanam dalam jiwa, yang dari padanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang, tanpa perlu dipikirkan dan dipertimbangkan lagi." Selanjutnya Al-Ghazali juga mengatakan bahwa, bila yang timbul darinya perbuatan mulia dan terpuji menurut syara' dan akal pikirannya yang sehat, dinamakan akhlak yang baik. Sebaliknya bila yang muncul adalah perbuatan yang jelek maka itu sumbernya dari akhlak yang jelek. (Ghazali, tt. : 52)

Ibn Miskawaih menerangkan bahwa manusia memiliki 3 daya yaitu: pertama, daya jiwa bernafsu (*al-nafs al-bahimiyyah*) sebagai daya terrendah yang melahirkan kemampuan badaniyah seperti makan, minum dan berkembang. Kedua, daya berani (*al-nafs al-sabu’iyyah*) sebagai daya pertengahan yang memberi kemampuan fisik berupa penginderaan dan kemampuan ruhani berupa *takhayyul, tafakkur* dan *ta’aqqul*. Daya yang kedua ini masih bersifat material sehingga berpotensi memakmurkan dan sekaligus merusak terhadap alam. Ketiga, daya berfikir (*al-nafs al-nathiqah*) sebagai daya tertinggi dan berasal dari Tuhan karenanya daya ini tidak akan mengalami kehancuran pada saat hancurnya badan jasmaniah. Oleh karena daya berfikir ini merupakan pancaran dari Tuhan, maka

ia memberi kemampuan pada manusia berupa kesadaran-kesadaran sebagai manusia seperti rasa malu, senang, sedih, pendapat-pendapat yang mulia dan sebagainya. Daya dari *al-nafs al-natiqah* ini menjadi bertugas menjadi pembimbing dan pengontrol bagi dua daya di bawahnya sehingga apabila tugas ini mampu dilaksanakan maka manusia tersebut akan memiliki akhlak yang mulia.(Miskawaih, 1994 : 67-69)

Menurut Imam Ghazali, dalam kitabnya *Mi'raj al-Shalikin*, tiga dimensi pembentuk manusia adalah *al-jism* yang merupakan unsur material, *al-ruh* yaitu panas dalam (*al-hararat al-ghariziyyat*) yang mengalir dalam pembuluh-pembuluh nadi, darah, syaraf dan otot-otot, serta *al-nafs* yang merupakan substansi manusia yang berdiri sendiri dan tidak bertempat. (Nasution, 1999: 94) Ketiganya merupakan unsur kesatuan pembentuk manusia yang tidak dapat dipisahkan. *Al-Jism* sebagai struktur jasmani menjadi hidup karena adanya ruh yang mengalir ke seluruh tubuh, karenanya ruh menjadi daya hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun esensi manusia terletak pada *al-nafs* yang memiliki sifat tetap dan menjadi tempat pengetahuan intelek (*al-ma'qulat*) yang berasal dari *alam al-malakut*. Unsur *al-Nafs* inilah yang membedakan manusia dengan hewan dan tumbuhan. Sedangkan pada bagian rohaniah manusia terbagi dalam empat pengertian: *ruh, nafs/jiwa, 'aql/akal* dan *qalb/hati* yang juga memiliki makna fisik dan nonfisik.(Rakhmat, 2000: 205) Dimensi-dimensi kemanusiaan inilah yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan akhlak seseorang

Manusia merasa dalam jiwanya terdapat kekuatan yang memperingatkan perbuatan buruk, dan usaha mencegah perbuatan tersebut. Bila ia tetap melakukan perbuatan buruk tersebut, maka kekuatan itu akan memarahinya sehinga akan muncul rasa penyesalan. Sebaliknya, kekuatan itu juga menyuruh kepada hal yang baik, dan mendorong untuk melakukannya, sehingga bila dilakukan munculkan rasa lapang dada dan kegembiraan. Itulah yang disebut suara hati atau hati nurani. (Amin, 1991 : 68) Suara hati ini memainkan peran penting dalam seseorang memilih keputusan moralnya, yang dalam pengertian Kant adalah imperatif kategoris. Hal ini karena ada fitrah kebaikan dalam diri manusia. Namun seiring

waktu, suara hati ini akan mendapat pengaruh dari banyak faktor seperti pendidikan, pengalaman dan lingkungan. Jika suara hati ini senantiasa ditaati, maka akan semakin kuat, sebaliknya jika dibantah dan tidak dituruti akan menjadi lemah. Semakin kuat suara hati, maka akan terjaga perbuatan manusia dalam tindakan yang baik dan tercegah dari perbuatan yang buruk. (Ahmad Amin 74)

Dari pengertian-pengertian di atas, maka akhlak dapat disimpulkan sebagai suatu sifat yang sudah meresap ke dalam jiwa dan menjadi kepribadian sehingga dari hal itu muncul suatu perbuatan yang spontan, langsung, dan mudah dalam menyikapi suatu hal, tanpa memerlukan pemikiran ataupun pertimbangan terlebih dahulu. Perilaku spontan yang timbul dan nampak adalah cerminan dari kepribadian seseorang tersebut sebagai bentuk kondisi kejiwaannya. Misalnya akhlak dermawan akan terlihat dari mudahnya memberi bantuan dan derma kepada orang lain yang membutuhkan, tanpa mempertimbangkan dulu untung ruginya. Sedangkan untuk melakukan derma masih menunggu untuk berfikir dulu dan membuat pertimbangan-pertimbangan tertentu, maka bukanlah seseorang itu dikatakan seorang yang berakhlak dermawan.

A.3. Teori Jalan Tengah : Standar Keutamaan Akhlak

Pada dasarnya etika menyoroti perilaku atau perbuatan manusia dan memberi penilaian atas perbuatan itu sebagai bernilai baik atau buruk. Secara etis makna “baik” mengarah pada sesuatu yang disetujui, anjuran, keunggulan, kebaikan, kekaguman dan keselarasan. Hal-hal tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan sesuatu yang disukai, menguntungkan, ramah, jujur dan terpuji. Sebaliknya, istilah “buruk” secara moral dipandang rendah, rusak, ketidakbaikan, dan tidak dapat diterima. Namun unsur utama dari keburukan pada dasarnya berada pada proses tindakannya, yaitu penolakan terhadap tercapainya tujuan yang ideal, kebahagiaan dan kesejahteraan individu maupun bersama. (Angeles, 1981 : 86, 111) Nilai baik dan buruk ini pada dataran etika bersifat universal, tetapi dalam praktisnya dapat berbeda-beda. (Bertens, 1993 : 150)

Sebagaimana konsep-konsep etika Islam yang yang bertebaran dalam al-Qur'an dan sunnah yang diterima anut oleh umat Islam. Diantaranya adalah konsep "baik" dalam istilah *ma'ruf, salih, birr, khair, hasan, thayyib,* dan *halal*. Sedangkan konsep "buruk" ada pada istilah *munkar, fasad, sharr, saw/su', fahsya'/fahisya*, dan sebagainya. Semua istilah-istilah dalam al-Qur'an yang dikaji oleh Izitsu (1993) ini memiliki nuansa pengertian yang sangat kaya, baik hubungan dengan Tuhan maupun dengan masyarakat sosial.

Hal "baik" ini dipandang sebagai kualitas yang utama, sehingga keutamaan bagi manusia adalah memilih perbuatan yang bernilai baik. Raghib al-Isfahani (w.1108) membagi "baik" ini dalam dua kategori, yaitu *Khair mutlaq* (baik hakiki) dan *Khair muqayyad* (baik kondisional). *Khair mutlaq* adalah perbuatan baik yang dipilih karena perbuatan itu sendiri dan setiap orang yang berakal pasti sangat menginginkannya. Sedangkan *Khair muqayyad* adalah perbuatan disebut baik tergantung sejauhmana sifat-sifat baik yang ada dalam perbuatan itu memberi kontribusi pada suatu oyek yang dinilai baik tersebut. (Amril, 2002 : 216) Pemikiran al-Isfahani ini nampaknya menjadi jembatan bagi pemikiran etika deontologis dan teleologis. Suatu perbuatan dipandang baik tidak saja karena memiliki tujuan yang baik, tetapi juga harus dilakukan dengan cara yang baik pula. Hal ini senada dengan pandangan Plato, filsuf Yunani kuno, bahwa suatu keutamaan yang benar bukan hanya perbuatannya yang benar, karena perbuatan yang benar kadang muncul dari dasar yang batil, tetapi keutamaan yang benar adalah perbuatan baik yang timbul dari pengetahuan yang benar dan motif yang benar. (Amin, 1991: 209)

Tentang keutamaan ini Aristotles, murid Plato, mengungkapkan teori moderasi (*The Golden Mean*), yakni tiap-tiap keutamaan berada di tengah-tengah dua keburukan, yaitu keburukan kekurangan dan keburukan kelebihan. (Amin, 1991: 111) Menurutnya, keutamaan atau kebajikan pokok (*cardinal virtue*) terdiri dari keadilan (*justice*), kebijaksanaan (*wisdom*), keberanian (*courage*), dan penguasaan diri (*self control*) (Salam, 1997 : 118) Pemikiran Aristotles ini banyak berpengaruh terhadap para etikawan dan filosof muslim, di antaranya adalah Ibn Miskawaih.

Setiap keutamaan berada di tengah 2 eketrim yang tercela di dua ujungnya. Demikian konsep keutamaan Ibn Miskawaih, yakni keutamaan itu terletak pada "jalan tengah" (*al-Wasath*) yang diartikan keseimbangan, moderat, harmoni, utama, mulia atau posisi tengah antara dua ekstrem. Jalan tengah ini berlaku umum dan hakikatnya adalah satu (*al-wasath al-haqiqi*) yaitu keutamaan itu sendiri berupa suatu garis lurus (*al-khat al-mustaqim*). Keutamaan akhlak secara umum berada di tengah kekurangan ekstrem dan kelebihan ekstrem daya jiwa. Posisi tengah dari jiwa *al-bahimiyyah* adalah kesederhanaan (*al-Iffah*), tengah dari jiwa *al-Ghadabiyyah* adalah keberanian (*al-Saja'ah*), dan tengah dari jiwa *Al-Nathiqah* adalah kebijaksanaan (*al-Hikmah*). Sedangkan gabungan dari ketiga keutamaan tersebut adalah keadilan (*al-'Adalah*). Keempat keutamaan ini merupakan hal yang pokok sementara keutamaan yang lain hanya cabang dari keempat hal ini, yang jenis dan pemahamannya dapat berkembang sesuai dengan siatuasi dan kondisi masyarakat.(Miskawaih, 1994 : 44-45) Posisi tengah yang dimaksud bukanlah posisi secara matematis, melainkan relatif yang dipahami secara umum sebagai antara 2 sisi. Nilai relatif ini mengandung dinamika sebagaimana dinamisnya kehidupan manusia yang senantiasa berubah dan berkembang. (Suwito, 2004 : 95)

Tabel 3.1 Jalan Tengah dan 2 Ekstrimnya

Ekstrim kekurangan (al-Tafrith)	**Posisi Tengah (al-Wasath)**	**Ekstrim kelebihan (al-Ifrath)**
Teraniaya (*al-Dzulm*)	Keadilan (*al-'Adalah*)	Menganiaya (*al-Indzilm*)
Kedunguan (*al-Baladah*)	Kebijaksanaan(*al-Hikmah*)	Kelancangan (*al-Safh*)
Pengecut (*al-Jubn*)	Keberanian (*al-Saja'ah*)	Nekad (*al-Tahawwur*)
Dingin hati (*al-Khumud*)	Sederhana/menahan diri (*al-Iffah*)	Rakus (*al-Syarh*)

(Suwito, 2004 : 93), (Miskawaih, 1994 : 52)

Al-Hikmah atau kebijaksanaan memiliki cabang-cabang kebijaksanaan, yaitu : 1) ketajaman intelegensia (*al-zaka'*), 2) kekuatan ingatan (*al-Zukr*), 3) rasionalitas (*ta'aqqul*), 4) ketangkasan (*sur'at al-fahm*), 5) jernih pemahaman (*shafa al-dzihn*), 6) jernih pemikiran (*jaudah al-dzihn*) 7) mudah dalam belajar. *Al-Saja'ah* atau keberanian memiliki cabang-cabang, yaitu : 1) jiwa besar (*kibar*

al-nafs), 2) pantang ketakutan (*al-najdah*), 3) ketenangan (*'idham al-himmah*), 4) keuletan (*al-sabah*), 5) kesabaran (*al-shabr*), 6) murah hati (*al-hilm*), 7) menahan diri (*'adam al-thaisy*), 8) keperkasaan (*al-syahamah*), 9) daya tahan (*ihtimal al-kadd*), 10) kebersamaan, dan 11) pengampun. Sedangkan *al-Iffah* atau kesederhanaan mencakup: malu, ramah, benar, damai, menahan diri, sabar, berarti, tenang, saleh, teratur, menyeluruh dan kebebasan. Sementara keadilan atau *al-'Adalah* memiliki cabang: persahabatan, persatuan, kepercayaan, kasih sayang, persaudaraan, pengajaran, keserasian, keterbukaan, ramah tamah, taat, penyerahan diri, pengabdian pada Allah, perdamaian, toleransi, menghindari keburukan dan sebagainya. (Miskawaih, 1994 : 46-50)

Hampir senada dengan itu, Raghib al-Isfahani mengungkapkan konsep *Makarim al-Syari'ah*. Yakni ungkapan terhadap sesuatu yang tidak akan menjauhkan diri dari sifat-sifat Tuhan yang terpuji seperti kebijaksanaan (*hikmah*), kebaikan (*juud*), murahhati (*hilm*), pengetahuan (*'ilm*) dan kepemaafan (*'afw*). (Amril, 2002 : 77) Istilah ini tidak hanya sebatas untuk mendapatkan predikat khalifah Allah SWT, atau ibadah dan *imarat al-ard*, sebagai fungsi manusia di bumi ini, tetapi juga memiliki jangkauan yang lebih luas yaitu menyangkut akhlak yang terpuji dan menghindarkan diri dari perbuatan yang tercela. (Amril, 2002 : 79)

A.4. Tujuan Etika Islam : Individual dan Sosial

Tujuan setiap tindakan dalam pandangan etika adalah untuk mendapatkan kebaikan (*some good*) yang diidentifikasi sebagai kebahagiaan (*happiness*) yakni suatu kondisi ideal yang sama bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat, menentukan ukuran baik dan buruk sejauh yang diketahui dengan akal pikiran manusia. Oleh karena pandangan dalam Islam, seluruh kehidupan manusia ini diorientasikan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, maka tujuan etika Islam adalah untuk mendapatkan keridlaan Alah. Keridlaan Allah ini menjadi kunci kebahagiaan yang dijanjikan Allah kepada umat manusia. (Syukur, 2004 : 5)

Tujuan akhlak menurut Ibn Miskawaih adalah untuk mencapai *al-Sa'adah*. Makna *al-Sa'adah* ini secara umum diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*),

tetapi sesungguhnya yang dimaksudkan Ibn Miskawaih adalah suatu konsepsi yang di dalamnya mengandung unsur kebahagiaan (*happiness*), kemakmuran (*prosperity*) keberhasilan (*success*), kesempurnaan (*perfection*), kesenangan (*blessedness*), kebagusan/kecantikan (*beautitude*).(Suwito, 2004 : 116) (ibn Miskawaih, 1994 : 92) Dengan mengembalikan makna akhlak sebagai keadaan jiwa yang mendorong perbuatan secara spontan, maka spontanitas yang dituju adalah spontanitasnya perbuatan yang bersifat ketuhanan (*af'al ilahiyyat*), yakni perbuatan yang semata-mata baik karena muncul dari inti kemanusiaan (*al-lubb*) yang hakikatnya adalah akal ketuhanan manusia itu sendiri (*'aqluhu al-ilahi*).(Suwito, 1996 : 118) (Ibn Miskawaih, 1994 : 98)

Konsep-konsep yang dipaparkan tersebut sangat kental dalam kajian dalam tasawuf atau msitisisme dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya etika Islam menjadi integral dengan berbagai pemikiran dalam Islam, bahkan menjadi orientasi hidup muslim, hidup dengan akhlak al-karimah. Kebahagiaan dalam konsep tasawuf bukan hanya berorientasi kepada ukhrawi tetapi juga duniawi. Ibn Khaldun dalam bukunya *Al-Muqaddimah*, menerangkan: seorang murid masih terus naik satu *maqam*[8] ke *maqam* lain sampai berujung pada *ittihad* dan *makrifat*[9] yang merupakan tujuan yang dicari kebahagiaan. Tujuan *Ittihad* para sufi adalah Yang Mahabenar yang akan melebur sifat-sifat tercela dan memunculkan sifat-sifat terpuji dalam jiwa manusia. Kata Al-Qusyairi ketika menjelaskan *maqam fana*[10] kaitannya dengan *ittihad* dan etika

---

8 *Maqam* (*station*) adalah suatu tingkatan kualitas seorang sufi yang berhasil ditempuh melalui perjuangan dan latihan yang berat untuk mengendalihan hawa nafsu, semakin tinggi semakin sulit, tetapi sekaligus semakin dekat kepada Tuhan. Istilah-istilah dalam *maqamat* (jamak *maqam*) sering dihubungkan dengan istilah *hal* (jamak: *ahwal*) yaitu keadaan spiritualitas seorang sufi yang diperoleh dari Allah sebagai anugerah dari suatu perjuangan atau latihan spiritualnya. (Nasution, 1995 : 62-63)

9 *Ittihad* adalah suatu tingkatan (*maqam*) dalam tasawuf di mana seorang sufi merasa bersatu dengan Tuhan, hingga yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu, hilangnya identitas karenma menyatu. Sedangkan *Makrifat* adalah tingkatan dalam tasawuf seorang sufi merasa mendapatkan pengetahuan tentang Yang Hakikat (Tuhan). Dalam literatur Barat sering disebut *Gnosis*. (Nasution, 1995 : 82, 75)

10 *Fana* dalam tasawuf terkadang dikategorikan sebagai *maqam* kadang juga dimasukkan sebagai *hal*. *Fana* adalah kondisi kejiwaan seorang sufi yang telah meghancurkan/menghilangkan kesadaran eksitensi dirinya (sebagai badan kasar) sehingga tertinggal kesadaran nan-Ilahi. Dalam pengertian yang lain *fana* sering diartikan sebagai : jika seseorang dapat menghilangkan maksiatnya, maka yang tertinggal adalah taqwanya, barangsiapa yang menghancurkan sifat-sifat (akhlak) buruk, tinggal baginya sifat-sifat baik. (Nasution, 1995 : 79-80)

menjelaskan: *fana*-nya seorang hamba dari perbuatan-perbuatan buruknya dan *ahwal* terendahnya adalah dengan meniadakan perbuatan-perbuatan tersebut, sehingga terwujud perilaku yang mulia dan luhur. (Shubhi, 2001 : 203)

Tasawuf sebagai mahzab etika karena ia menjawab kebutuhan sumber kewajiban etika. Dengan tanpa mengesampingkan rujukan otoritas eksternal, tasawuf yang memiliki perhatian dalam spiritual, menurut Ibn Al-Jauzi, tidak sepakat kalau seseorang beribadah akibat rasa takut, karena itu ibadahnya hamba sahaya, tidak juga ibadah dengan rasa harap karena itu ibadahnya pada pedagang. Bagi tasawuf ibadah merupakan ekspresi rasa syukur, karena itulah ibadahnya orang-orang yang bebas. (Shubhi, 2001 : 203)

Kebanyakan para sufi terkemuka memandang erat hubungan tasawuf dengan etika. An-Nuri : tasawuf bukanlah ilustrasi-ilustrasi ataupun pengetahuan-pengetahuan melainkan etika. Ibn Al-Qayyim : para perambah jalan ini menyepakati bahwa tasawuf adalah etika. Al-Jariri pernah ditanya, apakah tasawuf itu? Ia menjawab: tasawuf adalah keluar dari etika rendah dan masuk ke etika tinggi. Al-Kattani : tasawuf adalah etika, maka barangsiapa yang menambahkan kepadamu etika, berarti ia telah menambahkan kejernihan dalam dirimu. (Shubhi, 2001 : 204)

Pribadi yang memiliki akhlak yang sempurna (*akhlaq al-karimah*) dengan sendiri pasti akan berdampak dalam kehidupan sosialnya. Kehidupan bermasyarakat yang di dalamnya berisi interaksi-interaksi dan komunikasi dengan orang lain akan diwarnai oleh sikap dan perilaku individu. Perilaku dalam berinteraksi secara sosial dengan orang lain yang dilandasi dengan nilai-nilai kebaikan akan membawa kepada kebaikan dalam kehidupan bersama. Etika dalam kehidupan sosial ini menjadi panduan bagi individu dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan orang lain dalam konteks lingkungan yang plural dan beragam.

Orientasi moral dalam pengertian akhlak berbasis pada individu dalam menciptakan perilaku masyarakat. Adat kebiasaan dalam masyarakat dapat mempengaruhi perilaku individu, tetapi individu juga memiliki potensi menjadi agen pembangun budaya dalam masyarakat. Terlebih individu dipandang sebagai

entitas organis yang memiliki potensi-potensi kemanusiaan yang mandiri. Adat kebiasaan dalam masyarakat terbentuk di antaranya sebagai akumulasi perilaku-perilaku individu dalam konteks lingkungan sosialnya. Oleh karena itu etika Islam secara ekplisit maupun tidak, dalam pandangan etikawan muslim ditujukan sebagai kepekaan sosial atau kebaikan sosial.[11]

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Brian Fay (1996), bahwa Identitas group atau karakter masyarakat telah menjadi faktor signifikan dan istimewa dalam kehidupan kontemporer. Anggota group ikut hadir dan mengisi kebudayaan sosial mereka secara individu, partikular dan spesifik ikut mempengaruhi pola group atau masyarakatnya. Anggota group percaya mereka memiliki nilai mereka sendiri sehingga kesatuan group menguatkan identitas individu dan secara mendasar itu menjadi pembeda dengan group yang lain. Demikian juga masyarakat adalah sebuah proses strukturalisasi dimana organisasi perangkat-perangkat aturan dan tanggungjawab perorangan dalam kelanjutan pemikiran praktis penafsiran dan kehendak penuh kesadaran para agen. Aktivitas manusia selalu berhubungan dengan sebuah setting budaya dan masyarakat, sebuah *setting* di mana para agen tidak mandiri dalam bertindak melainkan sangat mungkin dibentuk oleh kedua hal itu.

Keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat ini jika tidak ada aturan yang menjadi acuan bersikap akan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap orang lain. Oleh karena itu diperlukan pedoman perilaku hidup sosial dan bermasyarakat, berupa etika sosial. Etika Sosial (*social Ethics*) adalah suatu pemikiran yang secara moral mengesahkan tekanan dalam masyarakat terhadap individu. Hal ini karena manusia adalah makhluk sosial, di mana kehidupannya terkait bahkan tergantung dengan keberadaan orang lain di sekitarnya. Sementara

---

[11] Ibn Miskawaih dalam pemikiran etikanya secara langsung mengkaitkan pentingnya kewajiban keagamaan dengan "perasaan (kepekaan) sosial (*social feeling*) manusia". Sedangkan Al-Ghazali lebih suka menjelaskan kewajiban-kewajiban etika religius semata-mata dari "pendekatan keagamaan" atau pendekatan wahyu, sehingga penekanan etika Al-Ghazali pada "keselamatan individu". (Abdullah, 2002 : 202) Namun demikian bukan berarti Al-Ghazali tidak memiliki perhatian terhadap masalah sosial, karena banyak pikirannya yang menyoroti berbagai persoalan kemasyarakatan. Kewajiban etika sangat erat hubungannya dengan sosial, tetapi menjadi kewajiban individu untuk menegakkan etika dalam konteks pribadi dan sosialnya secara luas.

interaksi yang terjadi antar individu maupun kelompok seringkali menimbulkan konflik oleh karena situasi poluralitas, baik pandangan hidup, ideologi, kepentingan, agama dan lain-lain.

Etika sosial ini menjadi penting agar masyarakat yang sarat dengan pluralitas ini memiliki mekanisme untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi, yakni berdasarkan nilai-nilai etika yang menjadi bagian fundametal dari tat kehidupan sosialnya. Untuk itu etika sosial membutuhkan prinsip-prinsip dasar kehidupan bersama :

1. Persamaan dan kebersamaan. Pengakuan terhadap kesetaraan, di mana masing-masing anggota sosial memiliki hak dan kewajian yang sama meskipun tanpa harus menghilangkan stratifikasi sosial dan pluralitas merupakan suatu keniscayaan kodrati yang telah menjadi realitas sosial. Prinsip persamaan (*equality*) secara substantif merupakan salah satu elemen bagi terbentuknya masyarakat yang rasional. Prinsip ini berperan sebagai kontrol terhadap kebebasan yang negatif.
2. Keadilan sosial, merupakan pilar utama untuk menuju suatu masyarakat sipil yang merdeka dan bebas. Menurut Ziaudin Sardar, prinsip ini didasarkan pada : kebebasan dalam kesadaran, prinsip persamaan yang menyeluruh bagi semua manusia, dan adanya tanggungjawab sosial dan individu.
3. Keterbukaan dan musyawarah, prinsip ini berkaitan dengan konsep masyarakat terbuka (*open society*,) yang diajukan Karl Popper, masyarakat terbuka yang bebas dan memungkinkan segala bentuk pengetahuan dan seluruh kebijakan sosial akan dapat dikritik karena bersifat transparan. Masyarakat yang terbuka akan menjadi bentuk sosial yang mampu melakukan proses falsifikasi yaitu kritik rasional terhadap bangunan epistemologi pengetahuan sosial, politik dan sebagainya di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. (Asy'arie, 1999 : 89-94)

Etika Islam dengan sendirinya merupakan formulasi dari ajaran Islam untuk mewujudkan keutamaan individu sehingga terbentuk harmonisasi pribadi --yang tidak hanya dengan Tuhan saja tetapi juga—dengan sosial. Islam tidak

mendorong perilaku yang pasif, menarik diri dari lingkungan sosial, melainkan keutamaan pribadi akan tampak dalam kehidupannya di masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibn Miskawaih:

> "…karenanya, jelas bahwa mereka yang mencari kebajikan melalui praktek-praktek esketik atau tidak bergaul dengan orang lain, dengan berdiam diri di gua, di gunung, atau tinggal di suatu pertapaan di padang pasir yang tandus, atau mengembara dari satu negeri ke negeri yang lain, orang-orang seperti ini tidak akan mencapai keutamaan-keutamaan insani (arif, adil, dermawan, sederhana), karena tidak yang tidak bergaul dengan orang lain, tidak tinggal bersama mereka di wilayah tertentu, tidak dapat memperlihatkan sikap sederhana, kebaikan kedermawanan dan sikap adi. …. Kebajikan bukanlah hal yang tidak tampak, melainkan termanifestasi melalui perbuatan, yakni ketika kita bermasyarakat, berinteraksi sosial, dan tinggal bersama orang lain. (Ibn Miskawaih, 1994 : 54)

B. Pemberitaan dalam Perspektif Etika Islam

Kehidupan manusia dalam semua dimensinya tidak bisa dilepaskan dari persoalan etika. Setiap perbuatan manusia senantiasa dipermaknai dengan standar etis tertentu yang menjadi acuan kehidupannya, baik aturan legal, ajaran agama, pandangan filosofis maupun adat istiadat masyarakat. Dari kesemuanya ini adalah untuk mengarahkan hidup manusia kepada tujuan tertingginya, yaitu mendapatkan kebahagiaan (*al-sa'adah, summum bonum, happiness*). Proses pencapaian tujuan hidup ini dilakukan dengan tindakan-tindakan yang diarahkan melalui kaidah moral atau etika sehingga mencapai keutamaan.

Tuntutan-tuntutan moral juga hadir pada saat manusia berinteraksi dengan pihak lain, seperti Tuhan, orang lain, masyarakat, bahkan dengan dirinya sendiri. Moralitas ini menjamin diri manusia untuk mencapai tujuan hidupnya, sekaligus menjaga tujuan orang lain dapat terwujud. Pada akhirnya kebahagiaan ini dapat dijamin oleh aturan-aturan moral atau etika untuk dapat dicapai oleh semua orang, oleh semakin banyak manusia, dan semakin luas masyarakat yang mendapatkannya. Wujud praktis etika yang memberi jalan bagi masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup ini dapat berupa nilai-nilai demokrasi, konstitusi, konvensi dan sebagainya.

Media massa sebagai suatu institusi yang hidup dalam masyarakat dengan sendirinya juga terikat dengan nilai-nilai etika yang berkembang di masyarakat. Nilai-nilai etika di masyarakat dengan sendirinya mengikat dirinya dalam

melakukan aktivitas-aktivitas pemberitaan, sebagai suatu bentuk interaksi dirinya dengan masyarakat. Berikut ini akan diulas tentang sorotan etika Islam terhadap pemberitaan dan media massa secara umum.

B.1. Kebebasan dan Tanggungjawab

Perbincangan tentang kebebasan perbuatan manusia dalam kajian teologi cukup ramai, apakah manusia memiliki kebebasan dalam bertindak, atau tidak. Dalam kajian teologi (*ilm qalam*), para teolog muslim terbelah dalam kelompok Jabariyah dan Qadariyah[12]. Namun dalam perbahasan tentang etika, para etikawan muslim mengerucut pada pendapat tentang adanya kebebasan bagi manusia. Hal ini karena disadari bahwa etika merupakan implikasi langsung dari adanya kebebasan. Seseorang dinilai berbuat baik atau buruk hanya jika ia mempunyai kebebasan untuk memilih tindakan tersebut. Seseorang yang berada dalam tekanan, pemaksaan dan ketidakbebasan tidak dapat dikenai penilaian baik atau buruk.

Asas tauhid Mu'tazilah[13] meyakini absolutnya kehendak Tuhan, maka dengan asas keadilan, Mu'tazilah mengakui kebebasan manusia disebabkan dari adanya taklif dan kewajiban-kewajiban etika dan syariat. Kebebasan sebagai prinsip guna dimungkinkannya implementasi kewajiban dan realisasi *reward* dan *punishment*. Jika sejumlah beban diwajibkan bagi manusia maka kebebasan merupakan atribut kehendak guna dimungkinkannya penerapan *taklif* sebagaimana diwajibkan. (Shubhi, 2001 : 163) Menurut Kant dalam *Fundamental principles of the metaphisical of morals*, dalam wilayah empirik, manusia tidak bebas arena seluruh indera tunduk mutlak pada dunia luar, dan pengetahuan manusia patuh terhadap obyek-obyek luar. Namun dalam wilayah non-empirik (*thing in self*) manusia adalah makhluk bebas. Karenanya independensi kehendak

---

[12] Jabariyah (*fatalism/predestination*) adalah aliran teologi yang berpendapat bahwa manusia tidak memiliki emerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya, sedangkan Qadariyah (*free will*) adalah aliran teologi yang berpandangan bahwa manusia memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam menentukan perjalanan hidupnya. (Nasution, 1986 : 31)

[13] Mu'tazilah adalah kelompok teologi Islam yang diprakarsai oleh Wasil Ibn Atha' (81-131H), di mana kelompok ini menitikberatkan pembahasan teologi melalui pemikiran-pemikiran filosofis dan rasional. (Nasution, 1986 : 38)

menjadi suatu keharusan, karena hal itu berakibat pada lebih dimungkinkannya penegakan etika. (Shubhi, 2001 : 163)

Dalam Al-Qur'an juga banyak memuat ayat-ayat yang secara eksplisit menunjukkan adanya peluang kebebasan bagi manusia untuk melakukan perbuatannya, seperti:

> "Allah tidak sekali-kali akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri." (QS. Al-Anfal : 53)
>
> "Barangsiapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barangsiapa ingin kafir biarlah ia kafir." (QS. Al-Kahfi : 29)
>
> "Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan secara setimpal, dan mereka tidak diperlakukan secara tidak adil." (QS. Ali Imron : 161)

Kebebasan membawa konsekuensi bagi manusia berupa tanggungjawab yakni tanggungjawab bagi dirinya sendiri dan tanggungjawab terhadap Tuhan. Selain ayat-ayat di atas, Al-Qur'an juga menyinggung secara karikatif keberadaan surga sebagai imbalan bagi orang-orang yang baik, dan neraka sebagai hukuman bagi orang-orang yang berbuat kejahatan. Itu sebabnya dalam pandangan tasawuf, kebebasan bukan berarti pilihan bebas sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan lebih pada pembebasan jiwa dari hawa nafsu dan ketergantungan kepada kesenangan duniawi. Kebebasan tidak terdapat dalam ketidakpedulian dalam memilih, melainkan ketidakpedulian terhadap relasi-relasi keduniawaian dan kondisi-kondisi keduniawian. (Shubhi, 2001 : 236) Dengan kata lain, seseorang yang melakukan perbuatan akan ditinjau dari motif dan sikap kejiwaan dalam melakukan perbuatan tertentu, yakni sebagai upaya mencari keridlaan Allah.

Pandangan teologis di atas memiliki implikasi besar dalam orientasi etika. Bahwa setiap orang memiliki hak dasar berupa kebebasan untuk melakukan tindakan yang dikehendakinya, tetapi sekaligus mendapatkan beban tanggungjawab sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Tanggungjawab (*responsibility*) ini oleh Abdullah Salam diartikan sebagai: *Having the character of a free moral agent; capable of determining ones's own acts; capable of deterred by consideration of sancion or consequences*. Tanggungjawab menunjukkan adanya kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu

perbuatan, dan kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan. (Salam, 1997 : 28)

Dalam tanggungjawab ini terdapat 3 unsur penting, yakni kesadaran; kecintaan; dan keberanian. Tanggungjawab mensyaratkan adanya kesadaran, yakni bahwa seseorang yang melakukan tindakan tersebut mengerti, memahami dan tahu tentang perbuatannya dengan konsekuensi tertentu. Unsur ini menegaskan posisi akal (kemampuan berfikir) sebagai syarat *taklif* atau adanya kewajiban etis dalam perbuatan. Unsur kecintaan menunjukkan adanya rasa suka atau cinta terhadap sesuatu akan menumbuhkan semangat atau menjadi motivasi untuk melakukan suatu perbuatan tersebut. Hal ini menunjukkan faktor motif dan kehendak dalam suatu perbuatan yang dikenai penilaian etika. Keberanian maksudnya adalah berani berbuat berani bertanggungjawab. Tanggungjawab harus ditunjukkan dengan adanya keberanian melakukan suatu perbuatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan menghadapi konsekuensinya. (Salam, 1997 : 33-34)

Adapun ayat-ayat dalam Al-Qur'an juga banyak menegaskan tentang tanggungjawab dari perbuatan manusia. Di antaranya adalah:

> "Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban?" (QS. Al-Qiyamah : 76)
>
> "Tanyakanlah kepada mereka: 'Siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang mereka ambil itu?'" (QS. Al-Qalam : 40)
>
> "Tiap-tiap diri (manusia) bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya." (QS. Al-Muddatstsir :38)
>
> "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, pengamatan, dan hati nurani itu akan diminta pertanggungjawabannya." (QS. Al-Isra' : 36)

Oleh sebab setiap tindakan yang akan dikenai penilaian etika harus berada dalam lingkup kebebasan, maka tinjauan terhadap etika pemberitaan juga bertolak dari pandangan bahwa media massa memiliki kebebasan penuh dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya berupa menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan kebebasan yang dimilikinya, media massa dapat dengan leluasa untuk melakukan aktivitas pemberitaan, melakukan fungsi perannya dalam menyampaikan informasi, membuka forum dialog publik, melakukan pendidikan bagi masyarakat, mengontrol situasi lingkungannya, menghibur, dan sebagainya.

Media massa untuk dapat memerankan fungsinya secara maksimal membutuhkan kebebasan. Masyarakat demokrasi yang hendak dibangun membutuhkan partisipasi publik yang maksimal, diantara saluran partisipasi tersebut adalah adanya media massa yang bebas. Di alam kebebasan media massa akan mampu menjadi penyeimbang bagi tiga kekuasaan kekuasaan yang lain – eksekutif, legislatif, yudikatif. Media massa dapat menyampaikan informasi secara tepat, benar, dan lengkap hanya jika media massa tidak ditekan dan diancam dengan pembredelan dan kriminalisasi pers.

Tidak dipungkiri bahwa dengan kebebasan ini, media massa dapat menjadi lebih baik atau malah lebih buruk. Namun demikian, peran media massa sebagai wadah artikulasi politik dan ruang publik bagi masyarakat demokrasi tidak dapat digantikan begitu saja oleh lembaga-lembaga sosial yang lain. Melalui media massa, masyarakat dapat melakukan kritik maupun autokritik bagi kemajuan bersama. Sedemikian pentingnya kemerdekaan bagi media massa atau pers ini, seimbang dengan arti penting kemerdekaan itu sendiri. Sebagaimana diungkapkan oleh Jefferson, pendiri konstitusi Amerika Serikat : "*Our liberty depends on the freedom of the press, and that cannot be limited without being lost* (bahwa kemerdekaan kita tergantung pada kebebasan pers, dan karena itu kebebasan pers tidak bisa dibatasi karena ia akan menghilangkan kemerdekaan itu sendiri). Demikian juga yang dikatakan oleh Albert Camus, seorang filosof Prancis: "*A free press can, of course, be good or bad, but most certainly without freedom, the press will never be anything but bad* (sebuah pers yang bebas sudah tentu dapat menjadi baik atau buruk, namun tanpa kebebasan pers itu, sudah bisa dipastikan persnya tidak akan menjadi apa-apa, hanya suatu keburukan belaka)."(Assegaff, 1993 : 20, 25)

Oleh karena itu, kebebasan pers atau media massa ini juga harus diikuti dengan dedikasi para pelakunya untuk memenuhi tanggungjawab konsekuensinya. Yakni menunaikan hak masyarakat untuk tahu (*rights to know, information*), tugas mengontrol masyarakat dan kekuasaan dari penyimpangan tujuan sosialnya, memerankan diri sebagai media artikulasi dan ruang publik untuk mengemukakan gagasan secara terbuka dan seimbang, dan lain-lain. Kebebasan memberitakan

disertai tanggungjawab menyampaikan informasi yang benar, akurat dan lengkap; kebebasan berpendapat dan melakukan kritik dibarengi dengan tanggungjawab kontrol sosial; kebebasan memilih berita dan narasumber diikuti dengan tanggungjawab menghormati privasi, seleksi diri untuk mencegah efek destruktif dari pemberitaannya, dan seterusnya.

Kebebasan dalam pandangan Islam dibangun atas dasar prinsip-prinsip tertentu. Pertama, hati nurani manusia hanya bergantung kepada Tuhan semata, yakni kepada siapa manusia harus bertanggungjawab. Kedua, setiap manusia secara pribadi bertanggungjawab atas perbuatannya dan ia sendiri yang harus menanggung akibat perbuatannya. Ketiga, Tuhan sudah mendelegasikan kepada manusia tanggungjawab untuk mengambil keputusan. Keempat, manusia telah diberi cukup bimbingan spiritual dan kualitas rasional yang memungkinkan mengambil pilihan yang baik dan bertanggungjawab. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan kebebasan yang dituntut oleh etika Islam adalah kebebasan yang bertanggungjawab. (Mulyana, 2001 : 127)

Jika dalam pandangan etika Islam – bagi manusia—tolakan sikap moral atau akhlak dibangun dari kondisi jiwa (*khuluq*), maka jiwa bagi media adalah para pelaku pemberitaan media itu sendiri, yakni wartawan, editor, dan redaktur sebagai *gatekeeper*[14], serta tentu saja pemilik media (*media owner*). Media massa hanyalah refleksi sikap dan pandangan dari orang-orang yang terlibat dalam proses pemberitaan. Maka etika pemberitaan sangat tergantung pula pada orientasi moral para pelakunya dalam mengolah pemberitaan dalam *newsroom* (dapur redaksi). Dalam pandangan kritis, para *gatekeeper* yang berada di dapur redaksi tidak bisa dipisahkan dari nilai dan ideologi yang diyakini atau dianut,(Eriyanto, 2003 : 33) terlebih nilai dan ideologi media yang dibangun melalui penetapan visi media.

---

[14] *Gatekeeper* atau penjaga gawang adalah istilah yang umum dipakai dalam kajian komunikasi untuk menggambarkan fungsi agen yang memfasilitasi proses informasi dalam masyarakat. *Gatekeeper* ini memberikan akses lalu lintas data dan informasi dari penyampai pesan ke penerima pesan dalam suatu bidang tanggapan indrawi segera (*immediate sensory field*). (Manca, 1998 : 48)

Media massa yang digerakkan oleh para *gatekeeper* di era kebebasan pers sekarang ini tentu dapat memilih tindakan-tindakan mana yang dipandang meupakan suatu keutamaan yang dapat mewujudkan tercapainya kebahagiaan masyarakat luas, dalam bentuk demokrasi, kesejahteraan, dan pencerdasan kehidupan masyarakat melalui pemberitaan yang akurat, tepat, berimbang, adil dan sesuai norma masyarakat. Atau sebaliknya, pemberitaan di media massa didominasi motif-motif ekonomi dan kapitalistik yang mendominasi visi media massa, sehingga pada akhirnya media massa hanya menjadi ajang mencari keuntungan-keuntungan belaka tanpa menghiraukan tanggungjawab terhadap masyarakatnya. Dari pemberitaan-pemberitaan ini masyarakat dapat mengukur etika sebuah media massa.

B.2. Berlandaskan Asas Keadilan

Sebagaimana diterangkan di awal, bahwa perbuatan manusia ditujukan untuk mendapatkan keutamaan. Di antaranya adalah sikap adil, bahkan adil dikatakan sebagai keutamaan yang paling tinggi. *'Adl* (keadilan), dalam kitab *Lisan al-'Arab*, adalah sesuatu yang terpatri di dalam jiwa yang lurus. *'Adl* juga merupakan sifat Allah yang berarti Allah tidak cenderung kepada hawa nafsu yang berakibat keputusan-keputusan-Nya curang. (Shubhi, 2001 : 46)

Al-Syahrastani mengutip Mu'tazillah, mendefinisikan keadilan sebagai kebijaksanaan rasional untuk melakukan perbuatan secara benar dan berguna. Sedangkan dari kalangan Asy'ariyah[15] mengartikan *'Adl* sebagai meletakkan sesuatu pada tempatnya.(Shubhi, 2001 : 46) Keadilan menurut Aristotels, filosof Yunani kuno, adalah keutamaan yang sempurna dan tidak bersifat pribadi, karena ia berkaitan dengan orang banyak. Karenanya, keadilan merupakan nilai keutamaan paling penting. Terbit dan tenggelamnya matahari pun tidak bisa mengalahkan pentingnya keadilan. Keadilan dianggap sebagai keutamaan

[15] Asy'ariyah adalah aliran teologi yang dipelopori oleh Abu al-Hasan 'Ali Ibn Ismail al-Asy'ari (873-935M) dari Basrah. Aliran ini menekankan pemahaman teologi melalui dalil-dalil al-Qur'an, Sunnah Nabi dan sunnah para shahabat. Kemunculannya merupakan reaksi terhadap kelompok Mu'tazilah yang dinilai terlalu rasional dan keluar dari As-Sunnah. (Nasution, 19886 : 65)

sempurna karena orang yang adil adalah orang yang dapat merealisasikan terwujudnya keadilan, tidak hanya kepada dirinya sendiri tetapi juga kepada orang lain. (Shubhi, 2001 : 47)

Dalam kehidupan, manusia senantiasa dituntut untuk bersikap adil, baik terhadap dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Sikap adil menjadi tonggak penyangga keserasian dan keharmonisan dalam kehidupan, karena tanpa adanya sikap adil tidak akan tumbuh rasa saling percaya, melindungi dan ketentraman. Sikap adil ini dalam kehidupan sosial menjadi suatu keniscayaan semua individu menuntut hak yang sama, sehingga apabila terjadi ketidakadilan, pasti ada hak-hak individu yang terlanggar. Situasi ketidakadilan ini dapat menumbuhkan perselisihan, perpecahan, permusushan dan akhirnya menimbulkan ketidak-tentraman. Sementara tujuan kehidupan manusia untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk itu dituntut perbuatan-perbuatan yang bernilai keutamaan.

Penerapan keadilan terhadap individu dan masyarakat tidak hanya sebatas lingkup formalitas guna menegakkan keharmonisan dan keteraturan, tetapi lebih dari itu, adil adalah sikap mental mendasar dari kehidupan batiniyah manusia dalam menegakan keharmonisan dan keteraturan dunia. (Amril, 2002 : 125) Itu sebabnya dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kepada keadilan, di antaranya:

> "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum, mendorong kamu untuk bertindak tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Maidah : 8)

Konsep adil dalam konteks pemberitaan ditunjukkan dengan istilah-istilah seperti *relevance* (relevansi), *balance* dan *cover both side* (seimbang), *neutral* dan *Impartiality* (netral dan tidak memihak), dan *proportional* (proporsional). Pemberitaan di media massa harus memiliki relevansi dengan kepentingan masyarakat baik untuk individu-individu dan terutama untuk kepentingan umum. Media massa hadir dalam masyarakat, oleh karena itu tidak boleh tercerabut dari akar masyarakatnya. Termasuk di dalamnya menimbang apakah pemberitaannya melanggar hak privasi atau benar-benar signifikan bagi masyarakat. Adil dalam konteks relevansi ini adalah menilai seleksi kualitas berita (*news selection*),

(Rahayu, 2006 : 19) yakni kegiatan mengukur, menyeleksi dan mengelola materi pemberitaan agar sesuai dengan situasi, kepentingan dan tujuan masyarakat.

Keseimbangan juga menjadi penerapan konsep adil, baik dalam bentuk *balance* yaitu keseimbangan dalam berita, maupun *cover both side* (menampilkan kedua sisi). Masyarakat membutuhkan informasi yang lengkap untuk pemahamannya terhadap suatu peristiwa maupun guna mengambil keputusan sikap terhadap peristiwa tertentu. Informasi pemberitaan harus menyoroti secara berimbang semua sisi berita, baik-buruknya, kelebihan-kekurangan dan suara-suara atau pendapat dari pihak-pihak yang terkait secara berimbang sehingga tidak menimbulkan bias pemahaman dalam masyarakat.

Pemberitaan juga menerapkan konsep adil dalam bentuk netralitas dan ketidakberpihakan. Media massa semestinya memerankan diri sebagai wadah terbuka yang memberi akses yang sama dan seimbang bagi semua pihak dalam masyarakat untuk tampil dan menjadi bahan diskusi publik. Kepentingan media massa adalah kepentingan masyarakat secara luas, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu. Dengan demikian maka pemberitaan di media massa dapat tampil secara berimbang, yang pada akhirnya memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memahami persoalan secara komprehensif dan tidak terpengaruh oleh bias kepentingan kelompok tertentu.

Pemberitaan di media massa juga harus dilakukan secara proporsional, yakni sesuai dengan apa adanya informasi tersebut. Media massa tidak boleh menambah-nambahi, melebih-lebihkan, mem-*blow-up* dan sebagainya suatu informasi dengan tujuan agar beritanya menjadi sensasional atau bombastis. Upaya-upaya ini hanya akan menimbulkan bias dan ketidakjelasan informasi yang merugikan kepentingan masyarakat luas untuk mengetahui situasi informasi yang sebenarnya.

B.3. Berpegang Teguh pada Kebenaran-Kejujuran

Ahmad Amin berpendapat “benar” adalah mengabari lainnya menurut apa yang ia yakini akan kebenarannya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Di

antara dusta adalah pembicara menghapus sebagian kenyataan dan menyebut perkataan lainnya, apabila menurut kata yang dihapuskan akan menjadikan apa yang disebut memiliki arti lain. Menyampaikan kebenaran berarti berkata benar dengan sebenar-benarnya, tiada sesuatu melainkan benar. (Amin, 1991 : 214)

Sedangkan kejujuran menurut Al-Syahrastani adalah mewartakan tentang sesuatu hal sesuai dengan faktanya, sementara dusta adalah mengabarkan tentang suatu hal yang berbeda dengan faktanya. (Shubhi, 2001 : 129) Menyampaikan kebenaran atau kejujuran ini termasuk keutamaan karena menjadi dasar terpenting masyarakat. Masyarakat yang plural dapat terintegral hanya dalam situasi di mana terdapat kepercayaan (*amanah*) terhadap semua pihak yang terlibat di dalamnya. Kepercayaan ini dibangun diantaranya melalui kejujuran.

Beberapa dalil naqli tentang kebenaran dan kejujuran ini antara lain:

> "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan sampaikanlah perkataan yang benar. Allah akan memperbaiki bagi amalan-amalanmu dan mengampuni bagi dosa-dosamu . Dan barangsiapa yang mematuhi Allah dan Rasul-Nya maka ia akan memperoleh sukses yang besar." (QS. Al-Ahzab : 70-71)
>
> "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, 'ini halal dan yang ini haram', untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung." (QS. An-Nahl : 116)
>
> "Katakan yang benar, walaupun pahit." (al-Hadits)

Kebenaran (*al-sidq*) adalah menginformasikan sesuatu sesuai dengan kenyataan, mengarahkan kepada cara berfkir yang positif ('*aql mujib*). Sedangkan kedustaan (*al-kizb*) merupakan final dari hal yang buruk, asal dari berbagai celaan dan keburukan. Akibatnya muncul fitnah dan adu domba yang dapat meningkat menjadi permusuhan dan pertentangan, akhirnya menimbulkan keserasan. Untuk membuktikan kebenaran suatu informasi maka diperlukan *tabayyun*. (Amin, 1991 : 274)

Indriyanti mengutip Jalaluddin Rakhmat, mengungkapkan bahwa konsep kebenaran dan kejujuran ini dengan sangat baik dioperasikan dalam kode etik *Sigma Delta Chi, the Society of Professional Journalism*, yang menyatakan*: the duty of journalist is to serve the truth.* (Indriyanti, 2006 : 79) Senada dengan Kovach (2006: 38) tentang elemen jurnalisme, kewajiban pertama jurnalisme

adalah pada kebenaran. Konsep kebenaran-kejujuran ini dalam perspektif media massa meliputi *fairness, truth, accuracy*, konfirmasi dan *check and recheck.*

Konsep-konsep jurnalisme tersebut mengisyaratkan kewajiban etis pelaku pemberitaan untuk bertindak jujur, menyampaikan kebenaran, tidak melakukan manipulasi informasi, pemutarbalikan pesan (*spinning of words*) dan selalu mencari keakuratan dan valisitas kebenaran yang diterima dan disampaikannya. Termasuk juga upaya untuk memastikan bahwa apa yang diberitakannya adalah suatu kebenaran adalah konfirmasi dan *check-recheck*. Konfirmasi adalah upaya untuk mendapatkan keterangan langsung dari orang yang bersangkutan, sehingga pihak tersebut dapat menyampaikan benar-tidaknya informasi yang menyangkut dirinya. *Check-recheck* adalah upaya untuk mendapatkan akurasi informasi, sehingga dapat disampaikan kepada masyarakat kondisi yang sebenarnya. Dalam tradisi Islam, konsep ini dikenal dengan istilah *tabayyun*. Hal ini untuk menghindari terjadinya *defamation* (pencemaran nama baik), baik berupa *libel* (hasutan) maupun *slander* (fitnah). (Potter, 2006 : 60)

> "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita maka periksalah dengan teliti (*fa tabayyanu*), agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa megetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu." (QS. Al-Hujurat : 6)

Media massa sudah semestinya membela kebenaran sehingga keadilan tegak, karena "keadilan di antara orang-orang" tidak dapat dilaksanakan tanpa menjaga kebenaran sebagai salah satu tugas utama komunikasi massa. Etika Islam memberi panduan sejauh mana pemberitaan itu tidak menjadi suatu hasutan, umpatan, penghinaan, sarkasme dan fitnah. (Mulyana, 2001 : 129)

B.4. Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Dalam terminologi Islam, konsep tentang "baik" sering dirujuk pada istilah *al-Ma'ruf* yang artinya semua orang secara kodrati tahu dan menerimanya sebagai suatu kebaikan, sedangkan "buruk" disebut *al-munkar* yaitu yang semua orang secara kodrati menolak dan mengingkarinya.(Asy'arie, 1999 : 86) Secara harfiyah kata *ma'ruf* berasal dari asal kata *'urf* yang berarti "yang dikenal" atau "yang dapat dimengerti, dipahami dan dapat diterima oleh masyarakat". Sedangkan

antonim dari *ma'ruf* adalah *munkar* yang berarti "yang dibenci, yang tidak disenangi, yang ditolak oleh masyarakat karena tidak pantas dan tidak patut dikerjakan oleh manusia yang berakal". (Izutsu, 1993 : 257) Imam Al-Raghib al-Asfahani dalam kitab *Mu'jam Mufradat Alfadz al-Qur'an* melengkapi pengertian ini. Menurutnya *al-ma'ruf* adalah *ismi li kull fi'l yu'rafu bi al-aql aw al-syar' husnubu* (nama bagi setiap perbuatan yang diakui mengandung kebaikan menurut pandangan akal dan agama), dan *al-munkar* adalah *ma yunkiru bihima* (sesuatu yang ditentang oleh keduanya/akal dan agama). (Rahmat dkk, 1996 : 172)

Ungkapan yang paling populer tentang kedua istilah ini adalah *amar ma'ruf nahi munkar*, yang kalimat lengkapnya sebenarnya adalah *al-amru bi al-ma'ruf wa al-nahyu 'an al-munkar*, secara etimologi berarti memerintahkan *al-ma'ruf* dan melarang *al-munkar*. (Syukur, 2004 : 215) *Amar ma'ruf nahi munkar* mengandung perintah untuk mengerjakan kebaikan dan mencegah keburukan yang istilah ini juga searti dengan istilah *taqwa*. Takwa berarti melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Perintah Allah baik yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an maupun yang dijelaskan melalui sunnah Nabi SAW adalah bertujuan untuk kebaikan manusia, dan karenanya terwujud dalam bentuk perilaku, tindakan dan perbuatan yang baik dan mulia. Demikian juga larangan Allah adalah untuk kebaikan dan kemuliaan manusia sendiri, sehingga hal-hal yang mendatang keburukan dan bernilai buruk harus dihindari.

Perintah untuk ber-*amar ma'ruf nahi munkar* di dalam Al-Qur'an antara lain:

> "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali Imron : 104)
>
> "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang berimana, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." (QS. Ali Imron : 110)

Perintah *amar ma'ruf nahi munkar* ini dalam al-Qur'an surat Ali Imron : 104 dan 110 disebut menunjuk hubungan *ma'ruf* dan *munkar* dengan kata *ummat* atau Masyarakat. Hal ini karena pengertian *ma'ruf* dan *munkar* dalam banyak

konteks selain menunjukkan sikap yang berhubungan dengan Tuhan, juga menunjuk relasi kemanusiaan (antar manusia, antar kelompok, individu dengan kelompok) dan perilaku sosial, sehingga perbuatan *ma'ruf* dan *munkar* dari anggotanya sangat mempengaruhi perkembangan masyarakat. Bahkan Muhammad Abduh mengatakan *fa al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahyu 'an al-munkar huffadz al-jama'ah wa siyaj al-wahdah* (*amar ma'ruf* dan *nahi munkar* adalah benteng pemeliharaan ummat dan pangkal timbulnya persatuan).

Kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* tidak khusus diperuntukkan bagi pemimpin saja, tetapi ia ditetapkan bagi setiap pribadi yang mampu melakukan ijtihad atau kewenangan untuk itu. Bahkan perintah ini dapat dilakuan dari masyarakat kepada pihak kekuasaan, sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, "Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim, dan jika masyarakat melihat orang yang zalim, dan mereka tidak mencegah perbuatannya, Allah akan menimpakan azab kepada mereka seluruhnya. Allah tidak akan menyelamatkan suatu umat di mana orang lemah tidak dapat dengan aman mengambil haknya dari orang kuat." (Rakhmat, 1996 : 177)

Istilah *ma'ruf* pada hakikatnya lebih menekankan makna sebagai kualitas nilai dibandingkan makna instrumen. Nilai intrinsik yang ada dalam sikap, perbuatan dan tindakan menjadi patokan, bukan perbuatannya itu sendiri. Seperti sikap yang baik seperti bersedekah menjadi tidak bernilai atau bahkan menjadi buruk apabila diikuti tindakan yang menyakitkan bagi si penerima. Oleh karena itu di antara persyaratan *amar ma'ruf* adalah mengetahui bahwa hal itu tidak berakibat pada kemudlaratan yang lebih besar. (Shubhi, 2001 : 193-194) Atau dengan kata lain *amar ma'ruf* harus dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* dan *nahi munkar* tidak boleh dilakukan dengan cara yang *munkar*, tetapi harus dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* pula.

Dalam konteks pemberitaan media massa, *amar ma'ruf nahi munkar* ini diterapkan melalui fungsi kontrol sosial. Media massa menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengontrol kekuasaan/pemerintah sekaligus mengontrol diri sendiri, sehingga terjadi dinamika dalam masyarakat. Masyarakat memiliki norma

dan nilai yang dianut, baik dari pemikiran filosofis masyarakat maupun dari nilai-nilai agama yang mendasari perilaku sosial masyarakat dalam mencapai tujuan bersama seperti mewujudkan masyarakat demokratis, sejahtera dan berkeadilan. Media massa berperan dalam mengontrol perilaku masyarakat dan kekuasaan agar selaras dengan nilai-nilai tersebut sekaligus membantu mengkonstruksi cara mewujudkan tujuannya.

Kritik yang disampaikan juga kritik yang konstruktif bagi perbaikan perilaku, sikap dan tujuan masyarakat. Suatu kritik selalu menginginkan adanya perbaikan, ini berarti kritik memiliki orientasi ke masa depan dan berhubungan dengan perlunya suatu situasi ideal dan perilaku ideal (*ideal conduct*) dalam masyarakat. Apabila kritik sosial ditujukan kepada suatu elit, maka biasanya yang dipermasalahkan adalah ada-tidaknya *high standards of performance* atau pelaksanaan fungsi dan tugasnya berdasarkan *ethos* dan moralitas yang tinggi yang diharapkan oleh masyarakat.(Susanto, 1977 : 5) Hal demikian juga berlaku dalam kritik sosial terhadap masyarakat pada umumnya, yaitu terwujud-tidaknya situasi ideal di masyarakat berdasar *ethos* dan moralitas yang secara bersama dan berdasarkan pengetahuan masyarakat itu sendiri.

Media massa dalam hal ini berperan sebagai media penyalur kritik sosial dari masyarakat, sekaligus sebagai tanggungjawab yang inhern dengan keberadaan dirinya. Kritik yang sampai kemasyarakat sangat mungkin menjadi kontroversial, tetapi ini membuka perdebatan dan diskusi yang adil sehingga menambah kedewasaan berfikir masyarakat. Walaupun suatu masyarakat tradisional masih menunjukkan ethos naturalistiknya sehingga mudah terjadi pertentangan nilai terhadap kritikan, tetapi dalam proses perubahan masyarakat dan pendewasaan berfikir, kritik sosial ini akan dapat menyadarkan masyarakat luas untuk mencari solusi dari situasi persoalan yang ada. (Susanto, 1977 : 7) Media massa bukanlah suatu ruang kosong, tetapi ia adalah entitas hidup yang juga memiliki fungsi dan peran aktif, di antaranya adalah melakukan kritik konstruktif.

Kaitannya dengan *ma'ruf* dan *munkar*, kritik sosial melalui pemberitaan di media massa juga harus menimbang situasi masyarakat di mana kritik tersebut ditujukan sehingga tidak menimbulkan kemudlaratan. Kritik harus dilakukan

dengan konstruktif secara ma'ruf. Kritik sosial tidak boleh malah menjadi kontraproduktif dengan tujuan kritik itu sendiri karena dipandang sebagai tindakan ke-*munkar*-an oleh masyarakat. Untuk mengukur kadar ke-*ma'ruf*-an kritik pemberitaan ini dapat dengan menyandingkan cara dan hal kritikan dengan ethos dan moralitas yang berlaku di masyarakat.

B.5. Al-Qur'an Tentang Pemberitaan yang Beretika

Islam mengatur kehidupan manusia, termasuk sistem komunikasi sosial yang berlangsung di masyarakat. Berdasarkan fakta, Al-Qur'an dihimpun dari *suhuf* (lembaran-lembaran tulisan), maka pemakaian kata *sahifa* (surat kabar) dan *sahafi* (wartawan) dalam bahasa Arab memiliki makna historis dan filosofis. (Mulyana, 2001 : 129) Termasuk juga istilah nabi, dari kata *naba'a* yang berarti berita, maka nabi adalah orang yang menyampaikan berita, suatu fungsi yang pada masa kini salah satunya adalah profesi wartawan. Bahkan di dalam Al-Qur'an sendiri kata "berita" secara langsung ditunjukkan dalam 66 ayatnya yang tersebar di 33 surat. (Indriyani, 2006 : 59)

Para Nabi pun oleh para teolog Islam disifati dengan 4 sifat yang wajib ada yaitu, *amanah* (terpercaya), *sidiq* (jujur), *fathanah* (cerdas), dan *tabligh* (menyampaikan wahyu). (Syukur, 2003 : 59) Keempat sifat wajib inipun korelatif dengan tuntutan ideal bagi *ethos* wartawan. Seorang wartawan haruslah orang yang bersifat *amanah* yakni terpercaya karena memiliki integritas pribadi yang unggul; *sidiq* diwujudkan dalam bentuk keterpihakan kepada kebenaran dan sikap jujur dan adil dalam menjalankan tugas profesionalnya; *Fathanah* menuntut kemampuan intelektual dan rasionalitas wartawan dalam menjalankan tugasnya, termasuk di dalamnya adalah bersikap bijaksana (*hikmah*) dalam menyikapi situasi peristiwa; dan *tabligh* dapat dimaknai menyampaikan kebenaran sekaligus membuka akses bagi persimpangan informasi di masyarakat.

Tugas wartawan melakukan pemberitaan juga dapat dianalogkan dengan tugas para nabi untuk berdakwah menyampaikan wahyu kepada ummatnya. Ak-Qur'an menunjukkan bagaimana cara kerja dakwah, sebagaimana ayat berikut:

> "Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesunguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. " (QS. An-Nahl : 125)

Ada tiga hal yang diungkapkan dalam ayat tersebut sehubungan dengan tugas pemberitaan, yakni: *hikmah*, *mauidhah hasanah* dan *mujadalah*. *Hikmah* secara umum dimaknai sebagai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Menurut al-Jurjani, *hikmah* adalah perkataan yang sesuai dengan ketentuan yang hak, dan menurut Al-Thaba'thaba'i adalah ungkapan yang benar sesuai dengan kenyataan yang terjadi dan senantiasa membawa kebahagiaan manusia. (Pimay, 48, 50) *Mauidhah hasanah* adalah nasehat atau perkataan yang tidak menyinggung dan melukai hati orang lain, makna yang lain adalah perkataan yang menimbulkan kesan mendalam sehingga menimbulkan efek pemahaman. (Pimay, 57) Nasehat menunjukkan adanya upaya kontributif berupa saran dan atau kritik untuk perbaikan sesuatu. Sedangkan *mujadalah* adalah perdebatan atau diskusi dengan argumentasi untuk menunjukkan kebenaran. Kalimat *billati hiya ahsan* dalam ayat di atas menegaskan bahwa diskusi atau dialog yang dilakukan dengan cara lemah lembut, tanpa kekerasan. (Pimay : 71)

Berangkat dari pengertian di atas, analogi dengan tugas etis pemberitaan di media massa adalah, pertama, pemberitaan harus dilakukan dengan cara hikmah, yakni sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya, seperti ideologi negara, agama, norma budaya dan sebagainya. Pemberitaan dilakukan dalam koridor relevansi (*relevance*) pandangan keduniaan (*view of world*) masyarakat yang melingkupinya. Kedua, pemberitaan memiliki dampak (*consequence*) bagi perbaikan masyarakat. Dalam pengertian yang lain, pemberitaan harus dilakukan dengan kalimat, bahasa yang santun, tepat, dan mengena sehingga menimbulkan efek opini yang konstruktif di masyarakat. Ketiga, pemberitaan di media massa sudah semestinya membuka polemik yang memperkaya masyarakat dengan argumentasi-argumentasi yang berimbang, sehingga masyarakat berkesempatan memilih informasi yang berguna untuk pengembangan dirinya. *Mujadalah* ini mengandaikan adanya fungsi ruang publik (*public sphere*) yang terbuka untuk masyarakat mengartikulasikan sikap dan pandangannya.

Selain hal-hal tersebut di atas, Al-Qur'an juga memberi contoh-contoh penggunaan kalimat dalam komunikasi, sehingga memungkinkan untuk menjadi

acuan etika berbahasa dalam pemberitaan di media massa. Konsep bahasa atau tutur kata (*qaul*) di dalam Al-Qur'an ini antara lain:

1. *Qaulan Layyina*; Perkataan yang halus dan lembut

   "Pergilah kalian berdua menemui Fir'aun dan berkatalah kepadanya dengan perkataan yang lembut (*qaulan layyina*) mudah-mudahan ia menjadi ingat dan tahu." (QS. Thaha : 44)

2. *Qaulan Baligha*; perkataan yang membekas atau berkesan

   "Mereka adalah orang-orang yang Allah tahu apa yang ada di hati mereka. Maka berpalinglah darinya, tetapi nasehatilah dan katakan kepada mereka apa yang tersirat dalam hati mereka sendiri dengan kata-kata yang mengesankan (*qaulan baligha*) dalam hati mereka." (QS. An-Nisa : 63)

3. *Qaulan Maysura*; Perkataan yang mudah, lembut dan menyenangkan

   "Jika engkau berpaling dari mereka (tidak sanggup memberi), karena engkau masih mengharapkan karunia Allah, maka katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang lemah lembut (*qaulan maysura*)." (QS. Al-Isra' : 28)

4. *Qaulan Karima*; Perkataan yang baik, penuh kebajikan, mulia

   "Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu untuk tidak menyembah selain kepada-Nya. Dan berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu, jika salah seorang di antara mereka telah lanjut usia, atau keduanya sudah tua, jangan sekali-kali engkau berkata, "cis" kepada mereka, dan janganlah engkau suka menggertak mereka, tetapi katakanlah dengan ucapan mulia (sopan, *qaulan karima*)." (QS. Al-Isra' : 23)

5. *Qaulan Sadida*, Perkataan yang lurus dan benar

   "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan berbicaralah dengan ucapan-ucapan yang benar (*qaulan sadida*), niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amal-amalmu." (QS. Al-Ahzab : 70-71)

6. *Qaulan Ma'rufa*, ungkapan yang baik dan pantas

   "Perkataan yang baik (*qaulan ma'rufa*) dan pemberian maaf lebih baik dari pada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasan penerima), dan Allah Mahakaya lagi Maha Penyantun." (QS. Al-Baqarah : 263)

Etika Islam hakikatnya meliputi segenap aspek kehidupan, oleh karena itu etika Islam atau akhlak ini dapat diterapkan dalam konteks etika pemberitaan. Terlebih, agama Islam dalam rentang sejarahnya di Indonesia telah hidup dalam masyarakat dan nilai-nilai ajarannya menjadi nilai moralitas bangsa Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu etika pemberitaan yang etis tidak akan lepas dari norma di masyarakat, termasuk moralitas, akhlak dan etika Islam.